

PENGARUH DEFISIT ANGGARAN, JUMLAH UANG BEREDAR DAN INDEPENDENSI BANK INDONESIA TERHADAP INFLASI

Yusni Maulida, Mardiana dan Anthoni Mayes

Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Riau
Kampus Binawidya Km 12,5 Simpang Baru – Pekanbaru 28293

ABSTRAKSI

Penelitian ini melihat bagaimana pengaruh defisit anggaran pemerintah, jumlah uang beredar dan independensi BI terhadap inflasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan website Bank Indonesia dari tahun 1990-2008. Variabel dalam penelitian ini antara lain: defisit anggaran pemerintah(X_1), jumlah uang beredar(X_2), Independensi Bank Indonesia(X_3) berupa dummy variable dan Inflasi (Y).

Metode analisis adalah kuantitatif dan deskriptif. Metode kuantitatif menggunakan regresi berganda. Metode deskriptif yaitu mendiskripsikan suatu permasalahan dengan menganalisis data dan hal-hal yang berhubungan dengan angka-angk.

Hasil analisis ini menyebutkan bahwa defisit anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap inflasi, sedangkan jumlah uang yang beredar dan independensi BI berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi.

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia di sebabkan oleh berbagai hal, baik yang berhubungan langsung atau tidak berhubungan langsung dengan kegiatan perekonomian. Pada dasarnya krisis ekonomi diakibatkan oleh semakin cepatnya integrasi perekonomian Indonesia ke dalam perekonomian global. Di satu sisi, keterbukaan perekonomian dengan sistem devisa bebas dan berbagai langkah deregulasi yang ditempuh pemerintah telah memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian domestik dewasa ini. Dengan dukungan kondisi makro ekonomi yang stabil, bergairahnya dunia usaha telah mengundang kembali masuknya investor-investor dan penanam modal asing dalam jumlah yang besar, khususnya dari sektor swasta. Berbagai perkembangan ini telah menjadi pendorong penting bagi tingginya kegiatan ekonomi Indonesia (Herlambang, *et al.* 2001).

Namun ditinjau dari segi lain, dinamisnya perekonomian makro yang tinggi tersebut tidak sepenuhnya disertai dengan upaya untuk menata pengelolaan dunia usaha. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya kualitas keputusan yang diambil dunia usaha dan pemerintah akibat kurangnya transparansi dan konsistensi serta lemahnya informasi dan kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya, baik oleh sektor swasta maupun pemerintah. Selain itu, kelemahan fundamental ekonomi juga tercermin pada kerentanan sektor keuangan khususnya perbankan (Herlambang, *et al.* 2001).

Dengan kondisi fundamental ekonomi seperti tersebut diatas, fluktuasi nilai tukar sebenarnya hanya merupakan efek penularan dari yang terjadi di Thailand telah menimbulkan krisis moneter dan berbagai kesulitan ekonomi yang sangat parah, dimana krisis ini mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 1998. Dengan tingginya arus modal keluar menyebabkan nilai tukar rupiah terus merosot. Utang luar negeri yang jatuh tempo, pembiayaan import dan minat spekulatif yang tinggi, semakin memperburuk

situasi dan membuat rupiah semakin tertekan (Rachbini dan Tono, 2000).

Krisis moneter yang terjadi pada saat itu juga tidak terlepas dari kebijakan bank sentral yang selalu membiayai deficit anggaran pemerintah dalam jumlah yang besar melalui penciptaan uang sehingga menyebabkan peningkatan pada laju inflasi.

Pada tahun 1999, kondisi keuangan pemerintah masih mendapat tekanan yang cukup kuat. Defisit anggaran pemerintah membengkak hingga mencapai jumlah -Rp.33.158,25 milyar (Bank Indonesia, 1999). Tahun 1999 ini juga merupakan tahun pertama dilaksanakan Independensi Bank Indonesia berdasarkan UU No. 23 tahun 1999. Setelah di sahkannya UU No. 23 tahun 1999 tersebut, pemerintah masih mengalami defisit anggaran. Pada tahun 2000, defisit anggaran pemerintah turun sampai jumlah -Rp.16.100 milyar. Tahun 2001 sampai dengan 2004 defisit anggaran pemerintah cenderung mengalami kenaikan dan kembali turun pada tahun 2005 dengan jumlah defisit sebesar -Rp.11.100 milyar. Ditengah fenomena inilah Bank Indonesia dengan independensi yang dimilikinya harus mampu menjadi lembaga yang bebas dari intervensi.

Undang-undang No. 23 tahun 1999 merupakan tonggak sejarah dan sekaligus menjadi momentum bagi Bank Indonesia untuk tampil sebagai lembaga yang independen. Sebelum adanya undang-undang ini, BI hanya berkedudukan sebagai subordinat pemerintah. Setelah lahirnya undang-undang No. 23 tahun 1999 ini, dimana falsafahnya adalah Independensi Bank Indonesia, maka terdapat salah satu perubahan penting dalam undang-undang perbankan di Indonesia yaitu, mengenai larangan pemberian kredit kepada pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam pasal 56 (Djiwandono, 2001).

Melihat kejadian yang dialami Indonesia pada tahun tahun sebelum ini dimana kebijakan bank sentral yang dipengaruhi pemerintah mempunyai peran dalam memperburuk kondisi perekonomian Indonesia, maka sudah saatnya dibutuhkan bang sentral yang bebas dari campur tangan pemerintah. Independensi bank sentral diharapkan akan dapat efisiensi dalam pemanfaatan dana /anggaran Negara sehingga dapat mencapai stabilitas ekonimi.

Stabilitas perekonomian suatu Negara menjadi tujuan pembangunan ekonomi. Untuk itu perangkat dari tujuan tersebut harus menjadi perhatian. Defisit anggaran yang terjadi secara terus menerus dan sebelum independensi diatasi oleh bank sentral dengan menciptakan uang baru tentu saja berpengaruh terhadap nilai rupiah. Dalam kondisi krisis ekonomi keadaan tersebut memperburuk situasi perekonomian Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh defisit anggaran pemerintah terhadap inflasi?
2. Bagaimana pengaruh jumlah uang beredar dalam arti luas terhadap inflasi?
3. Bagaimana pengaruh independensi BI terhadap inflasi?

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui :

- a. Pengaruh defisit anggaran pemerintah terhadap inflasi.
- b. Pengaruh jumlah uang beredar dalam arti luas terhadap inflasi
- c. Pengaruh independensi BI terhadap inflasi .

Dengan mengetahui hal-hal diatas, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi pengambil kebijakan dalam membuat kebijakan berkenaan dengan tujuan pembangunan yakni stabilitas ekonomi yang mantap.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

1. Defisit anggaran pemerintah (X_1)
2. Jumlah uang beredar (M2) (X_3)
3. Independensi BI (X_3)
4. Inflasi (Y)

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari lembaga-lembaga atau instansi-instansi antara lain Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun data yang digunakan adalah :

1. Data defisit anggaran pemerintah Indonesia tahun 1990-2008
2. Data Jumlah uang beredar 1990 - 2008
3. Independensi BI menurut undang-undang no.23 tahun 1999
4. Data inflasi di Indonesia tahun 1990-2008

Data yang telah di himpun akan dinalisis dengan regresi linier berganda semi log dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \ln \beta_2 X_2 + \beta_3 D + e$$

Keterangan :

Y = Inflasi

X_1 = Defisit anggaran pemerintah

$\ln X_2$ = jumlah uang beredar

$X_3 (D)$ = Independensi BI

a = konstanta

b_1, b_2, b_3 = koefisien regresi X_1, X_2, X_3

e = standar error

Defisit Anggaran

Terdapat beberapa definisi defisit. Secara konvensional, defisit dihitung berdasarkan selisih antara total belanja dengan total pendapatan termasuk hibah. Sementara itu, pengertian kedua adalah defisit moneter. Defisit moneter adalah selisih antara total belanja pemerintah (di luar pembayaran pokok hutang) dengan total pendapatan (di luar penerimaan hutang). Pengertian ketiga adalah defisit operasional, yaitu defisit moneter yang diukur dalam nilai riil dan bukan nilai nominal. Defisit primer merupakan selisih antara belanja (diluar pembayaran pokok dan bunga hutang) dengan total pendapatan. Selain itu, masih terdapat beberapa definisi dari defisit dan sangat tergantung pada kriteria yang digunakan serta tujuan analisis. Biasanya pilihan konsep defisit yang tepat tergantung oleh beberapa faktor, antara lain: jenis ketidakseimbangan yang terjadi, cakupan pemerintah (pemerintah pusat, konsolidasi pemerintah, dan sektor publik), metode akuntansi (*cash dan accrual basis*), dan status dari *contingent liabilities* (Simanjuntak dalam Waluyo, 2004).

Dalam ekonomi makro defisit anggaran merupakan salah satu faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menyusun anggaran. Defisit anggaran adalah selisih antara seluruh penerimaan (di luar pinjaman) dengan total pengeluaran. Dalam anggaran pemerintah Indonesia, defisit anggaran tersebut terlihat sebagai selisih antara dana pembangunan dengan pengeluaran pemerintah (selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin). Suatu anggaran dapat dikatakan mengalami defisit anggaran apabila besarnya pengeluaran pemerintah melebihi penerimaannya (Goeltom, 2000).

Dalam penelitian ini, ukuran defisit yang digunakan adalah defisit anggaran sesuai APBN Indonesia dimana jumlah defisit adalah total penerimaan pemerintah ditambah dengan hibah dan kemudian diselisihkan dengan pengeluaran pemerintah.

Menurut Barro (Pamuji, 2008) defisit dapat disebabkan oleh upaya pemerintah mempercepat pertumbuhan ekonomi; pemerataan pendapatan masyarakat; melemahnya nilai tukar; pengeluaran akibat krisis ekonomi; realisasi yang menyimpang dari rencana; serta pengeluaran karena inflasi.

Jumlah Uang Beredar

Dalam teori moneter penawaran uang (*money supply*) mempunyai arti yang sama dengan jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar dapat didefinisikan sebagai uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah semua uang kertas dan uang logam yang diedarkan secara resmi oleh bank sentral, sedangkan uang giral adalah saldo-saldo rekening bank yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk pembayaran dengan menggunakan cek, giro dan sebagainya (Boediono, 1982).

Dengan demikian dalam arti sempit jumlah uang beredar didefinisikan sebagai M1 yaitu keseluruhan uang kartal dan uang giral yang dipegang oleh masyarakat dan disimpan pada bank-bank umum. Jumlah uang beredar M1 seluruhnya terdiri dari uang kertas dan uang logam dan disimpan dalam bentuk giro (*Widodo, 1990*).

Defenisi yang lebih luas lagi mengenai jumlah uang beredar adalah M2 yang merupakan penjumlahan dari M1 dan uang kuasi. Dalam sistem moneter di Indonesia, M2 sering disebut juga dengan likuiditas perekonomian. Uang kuasi untuk sementara kehilangan fungsinya sebagai media pertukaran, sehingga uang kuasi ini baru bisa berfungsi sebagai alat transaksi bila sudah dikonversikan menjadi uang kartal dan uang giral (*Munir, 1994*).

Independensi Bank Sentral

Menurut Undang-undang No. 23 tahun 1999, independensi bank sentral adalah sebuah lembaga negara yang bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, dan pihak lain dilarang untuk melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas BI, dengan demikian pula BI wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Alan S. Blinder (Djiwandono, 1998) mengatakan bahwa independensi bank sentral berarti bahwa bank sentral bebas menentukan bagaimana mencapai sasaran yang telah dibuatnya, sangat sukar bagi lembaga lain untuk mengubahnya. Atau dengan kata lain dilarang adanya intervensi dari lembaga lain. Menurut Nordhaus (1975), Rogoff dan Sibert (1998), bank Sentral yang independen membebaskan ekonomi dari siklus politik (*Political cycle*) dengan mencegah manipulasi pemilihan kembali kebijakan moneter.

Inflasi

Inflasi adalah suatu gejala dimana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus (Nanga, 2001), sedangkan menurut Ackley (Iswardono, 1996), inflasi adalah kenaikan harga-harga secara terus menerus

Menurut Turvey (1997), inflasi adalah variabel yang melambung yaitu tingkat harga ataupun upah

umum (*Wage Spiral Inflation*). Menurut F.W. Paish, (1997), inflasi adalah pendapatan nominal meningkat jauh lebih cepat bila dibandingkan dengan peningkatan arus barang dan jasa yang dibeli (pendapatan nasional riil)

Kaum klasik berpendapat bahwa inflasi disebabkan kenaikan atau pertumbuhan jumlah uang beredar, atau mereka mengatakan inflasi merupakan gejala moneter (Nanga, 2001). Berbeda dengan kaum klasik, Keynes mengatakan bahwa inflasi bukanlah murni sebagai fenomena moneter.

HIPOTESIS

Hipotesis adalah kesimpulan sementara dari penulis dalam menganalisis pengaruh defisit anggaran pemerintah, jumlah uang beredar dan independensi BI terhadap inflasi adalah :

1. Diduga terdapat pengaruh positif antara defisit anggaran pemerintah terhadap inflasi.
2. Diduga terdapat pengaruh positif antara independensi BI dengan dengan inflasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai defisit APBN terjadi sejak awal rezim Orde Lama hingga tahun saat ini. Walaupun menggunakan asas anggaran berimbang, sebenarnya anggaran selalu mengalami defisit. Pembiayaan defisit dapat dilakukan melalui pencetakan uang atau monetization, utang luar negeri, dan utang domestik. Dalam APBN, pembiayaan defisit terbagi menjadi dua pos yaitu pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri dapat bersumber dari perbankan dan non-perbankan. Pembiayaan melalui sektor perbankan dapat melalui bank sentral dan bank umum. Defisit anggaran yang melalui sektor perbankan tersebut dapat ditelusuri melalui neraca otoritas moneter dan neraca konsolidasi bank umum yang berupa perubahan *net claim central government* (Joko Waluyo, 2006). Sementara itu, pembiayaan melalui sektor non-perbankan dapat berupa privatisasi, penjualan aset, surat berharga negara, dan dana investasi pemerintah.

Pada tahun 1960-an defisit dibiayai oleh pencetakan uang baru yang mengakibatkan inflasi hingga 128,84% pada tahun 1968. Untuk menghindari kesalahan yang sama, defisit selanjutnya dibiayai dengan utang luar negeri. Sejak saat itu tepatnya pada tahun 1968 hingga tahun 2000 utang luar negeri menjadi sumber pembiayaan defisit yang paling dominan. Tahun 2001 pembiayaan defisit melalui utang luar negeri mulai ditekan. Alternatif pembiayaan dari dalam negeri mulai menjadi sumber pembiayaan yang dominan. Hingga saat ini pun pembiayaan dalam negeri menjadi sumber pembiayaan defisit yang diandalkan.

Dari tahun 1990 sampai tahun 1996 perkembangan inflasi di Indonesia cukup stabil dan tidak terlihat terjadinya kenaikan inflasi yang terlalu mencolok. Hal ini dapat dikatakan bahwa perekonomian Indonesia relatif stabil. Gejala perekonomian Indonesia baru dirasakan pada awal tahun 1997, dimana terjadi krisis moneter yang kemudian merambah menjadi krisis ekonomi dan krisis politik, akibatnya inflasi meningkat menjadi 11,05%. Rentetan krisis yang terjadi di Indonesia ini berakibat buruk pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dan semakin memburuk dan tingkat inflasi mencapai angka 77,63% pada tahun 1998, hal ini merupakan tingkat inflasi terburuk yang pernah dialami Indonesia selama kurun waktu 15 tahun terakhir.

Tabel IV.1 : Perkembangan Inflasi di Indonesia

TAHUN	Laju Inflasi
1990	1.4

1991	9.5
1992	6.44
1993	9.77
1994	9.24
1995	8.64
1996	6.47
1997	11.05
1998	77.63
1999	2.01
2000	9.4
2001	12.55
2002	10
2003	5.1
2004	6.4
2005	17.1
2006	6.6
2007	6.59
2008	11.6

Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (BI) berbagai Edisi

Dalam perekonomian makro defisit anggaran merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan. Anggaran dikatakan defisit apabila total pengeluaran suatu negara melebihi total penerimaan negara tersebut.

Pengawasan terhadap defisit anggaran menjadi penting dalam manajemen ekonomi makro karena anggaran mempunyai tiga fungsi utama dalam roda perekonomian suatu bangsa. *Pertama* adalah fungsi alokasi yang mencakup penyediaan dana bagi kebutuhan masyarakat banyak akan sarana dan prasarana yang tidak mungkin akan disediakan oleh swasta tanpa campur tangan pemerintah. *Kedua* fungsi distribusi yaitu pengeluaran pemerintah yang diarahkan untuk mengurangi kesenjangan dan pemeratakan pendapatan antar warga negara. *Ketiga*, fungsi stabilisasi, yaitu anggaran pemerintah yang diajukan untuk memelihara tingkat kesempatan kerja yang lebih tinggi, kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi yang memadai.

Setelah tahun 1997, yaitu tahun 1998 sampai dengan tahun 2006 anggaran pemerintah selalu mengalami defisit yang cukup besar. Pada tahun 1998, terjadi krisis moneter yang merambat menjadi krisis ekonomi dan krisis politik, sehingga menyebabkan penurunan yang besar dalam penerimaan negara. Hal ini menyebabkan anggaran mengalami defisit sebesar Rp.81.323 milyar, jumlah defisit ini berhasil dikurangi pada tahun 1999 sehingga menjadi Rp.47.817 milyar. Tahun 1999 merupakan tahun pertama dilaksanakan independensi Bank Indonesia berdasarkan Undang-undang no 23 tahun 1999. Dimana Bank Indonesia tidak diperbolehkan lagi ikut serta dalam pembiayaan defisit anggaran pemerintah. Defisit anggaran pada tahun 1998-1999 ini turut dibiayai oleh Bank Indonesia melalui penciptaan uang primer.

Pada tahun 2001, kondisi keuangan pemerintah masih mendapat tekanan yang cukup kuat, defisit anggaran pemerintah kembali terjadi hingga mencapai jumlah Rp.57.364 milyar. Pada tahun 2002, defisit anggaran tetap terjadi sebesar Rp.34.436,3 milyar dan melambung menjadi Rp.62.671,6 milyar pada tahun 2004. Jumlah defisit yang cukup besar tersebut dapat dikendalikan pada tahun 2005 menjadi Rp.13.975 milyar. Dengan defisit ini sebagian besar dibiayai oleh hasil privatisasi BUMN dan penjualan aset, program restrukturisasi perbankan, dan sisanya dibiayai dari pinjaman luar negeri.

Realisasi anggaran pemerintah kembali mengalami kenaikan defisit sebesar Rp.32081 milyar pada tahun 2006, selanjutnya di tahun 2007 dan 2008 defisit anggaran pemerintah kembali mengalami kenaikan, kenaikan defisit anggaran kali ini lebih disebabkan oleh kebijakan pemerintah untuk mencicil utang luar negeri yang bunganya relatif tinggi. Selanjutnya perkembangan anggaran pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel IV.2 : Perkembangan Defisit Anggaran Pemerintah
(Milyar Rupiah)**

TAHUN	Surplus/ Defisit
1990	-4559
1991	-2907
1992	-3779
1993	751
1994	509
1995	-1037
1996	-298
1997	-1331
1998	-81328
1999	-47817
2000	-44134
2001	-57364
2002	-42328
2003	-34436.3
2004	-62671.6
2005	-13975
2006	-32081
2007	-37399.3
2008	-42979.0

Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (BI) berbagai Edisi

Jumlah uang beredar (*Monney Supply*) di Indonesia di definisikan sebagai tagihan masyarakat terhadap sektor perbankan. Indonesia secara resmi menganut konsep jumlah uang beredar M1 (*Narrow Money*), dimana uang kuasi yang berupa deposito berjangka dan tabungan bukan merupakan komponen jumlah uang beredar, melainkan hanya sebagai bagian dari likuiditas perbankan.

Selama periode penelitian 1990-2008, terlihat bahwa laju pertumbuhan uang beredar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik uang kuartal, uang giral maupun uang kuasi. Pada akhir periode 1990-an, pemerintah berusaha melakukan proses pemulihan ekonomi. Awal tahun 2001 merupakan situasi optimis berlanjutnya proses pemulihan ekonomi setelah krisis ekonomi dan politik pasca krisis 1998. pada tahun ini M2 mengalami peningkatan sebesar 12,99% sehingga mencapai Rp.844.053 milyar.

**Perkembangan Jumlah Uang Beredar di Indonesia 1990 - 2008
(Milyar Rupiah)**

Tahun	Uang Kartal	Uang Giral	M1	Uang Kuasi	M2	M2 %
-------	-------------	------------	----	------------	----	------

1990	9.093	14725	23.818	60.811	84.629	44.16
1991	9.346	16996	26.342	72.717	99.059	17.05
1992	11.346	17301	28.779	90.274	119.053	20.19
1993	14.431	22374	36.805	108.397	145.599	21.96
1994	18.634	26740	45.374	12.938	174.512	20.19
1995	20.807	31870	52.667	169.961	223.300	27.58
1996	22.487	41602	64.089	224.543	288.632	29.64
1997	28.424	49919	78.343	277.300	355.643	23.22
1998	41.394	59803	101.197	476.184	577.381	62.35
1999	58.353	68731	127.084	521.572	646.205	11.92
2000	72.371	89815	162.186	584.842	747.028	15.60
2001	76.342	101389	177.731	666.322	844.053	12.99
2002	80.686	111253	191.939	691.696	883.908	4.72
2003	94.542	129257	223.799	731.893	955.692	8.12
2004	109.028	144,553	253.818	779.710	1.033.877	8.14
2005	123.991	157,589	21.905	921.310	1.202.762	9.20
2006	150.654	196,359	347.030	1.032.018	1.382.493	10.65
2007	182,967	234,295	450,055	1,196,119	1,649,662	19,32
2008	209,747	249,998	456,787	1,435,772	1,895,839	14,92

Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (BI) berbagai Edisi

Dengan lahirnya Undang-Undang no.23 tahun 1999. maka bank Indonesia resmi menjadi lembaga yang Independen. Tapi upaya untuk mewujudkan Bank Sentral yang independent sudah lama ditempuh sebelum tahun 1999. Pada tahun 1953, dikeluarkan undang-undang no.11 tahun1953 tentang tugas-tugas pokok bank sentral. Dengan adanya undang-undang tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah telah mempunyai keinginan yang kuat untuk menciptakan suatu bank sentral yang mandiri dan bebas dari pengaruh kolonial.

Pada era demokrasi terpimpin, gubernur BI dimasukkan menjadi anggota kabinet dengan sebutan Menteri Urusan Bank Sentral dalam Undang-Undang No.13 tahun 1968, keberadaan Dewan Moneter sebagai policy making body mulai diperkenalkan dan diaktifkan. Pada era reformasi. BI kembali menemukan momentum penegakan Independensinya melalui Undang-Undang No.23 tahun 1999. Pada Undang-undang kali ini tugas dan tanggung jawab BI sebagai bank sentral lebih jelas. yaitu sebagai otoritas moneter yang bertanggung jawab dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.

Independensi Bank Indonesia (*Dummy Variabel*)

Tahun	X3 (D)
1990	0
1991	0

1992	0
1993	0
1994	0
1995	0
1996	0
1997	0
1998	0
1999	1
2000	1
2001	1
2002	1
2003	1
2004	1
2005	1
2006	1
2007	1
2008	1

Berdasarkan perumusan model yang telah dijelaskan, yang digunakan untuk melihat kebenaran hipotesis, maka regresi yang digunakan adalah regresi berganda dengan menggunakan data tahunan antara tahun 1990 sampai 2006. Secara umum model persamaan linear ditulis sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \ln \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Inflasi

X₁ = Defisit anggaran pemerintah

X₃(D) = Independensi BI (*Dummy Variabel*)

a = konstanta

b₁, b₂, b₃ = koefisien regresi X₁, X₂, X₃

e = standar error

Analisis yang digunakan adalah analisis regresi terlihat sebagai berikut :

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-17.628	25.277		-.697	.496
defisit	.000	.000	-.959	-5.129	.000
Uang Beredar M2	2.306	2.180	.224	1.058	.037
independensi	-30.861	6.862	-.971	-4.497	.000

a. Dependent Variabel: inflasi

Sumber : Data olahan 2010

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linier berganda, diketahui bahwa terdapat hubungan

antara variabel keputusan konsumen (Y) dengan variabel faktor internal (X_i), faktor eksternal, persamaannya yaitu:

$$Y = -17.628 + 0 + \ln 2.306 + -30.861 + e$$

1. Konstanta memiliki nilai sebesar -17.628 menyatakan bahwa jika variabel independent yaitu defisit anggaran pemerintah, jumlah uang yang beredar dan independensi BI tidak ada atau sama dengan 0 maka nilai inflasi telah ada sebesar -17.628 satuan.
2. Hasil koefisien regresi X1 sebesar 0 menyatakan bahwa defisit anggaran dalam uji statistik ini tidak memiliki pengaruh terhadap inflasi.
3. Hasil koefisien regresi X2 sebesar 2.306 menyatakan bahwa setiap penambahan satu satuan pada jumlah uang yang beredar dan variabel yang lain dianggap konstan maka akan meningkatkan inflasi 2.306 satuan.
Hasil koefisien regresi X3 sebagai dummy variabel sebesar -30.861 menyatakan bahwa terjadi penurunan inflasi sebesar 30.861 satuan setelah independensi BI.

R-Square (R^2)

Nilai R^2 menunjukkan besarnya variabel-variabel independent dalam mempengaruhi variabel dependent. Nilai R^2 berkisar antara 0 dan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$)

- a. Semakin besar nilai R^2 , maka semakin besar variasi variabel dependent yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independent. Sebaliknya, makin kecil nilai R^2 , maka semakin kecil variasi variabel dependent yang dapat di jelaskan oleh variasi variabel independent.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistiks				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.838 ^a	.703	.643	9.73838	.703	11.824	3	15	.000

a. Predictors: (Constant), independensi, defisit, log_x1

b. Dependent Variabel: inflasi

Sumber : Data olahan, 2010

Hasil analisis regresi menunjukkan besarnya koefisien determinasi (R^2) secara simultan adalah sebesar 0.703, hal ini berarti bahwa persentase faktor defisit anggaran, faktor jumlah uang beredar dan independensi BI dalam mempengaruhi inflasi sebesar 70,3% sedangkan sisanya sebesar 29,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini. Nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0.838 berarti hubungan keeratan secara bersama-sama antara variabel dependen dan variabel independen cukup kuat karena R lebih besar dari 0,5.

Uji Parsial (Uji t)

Dari tabel tersebut terlihat nilai probabilitas t hitung untuk masing-masing variabel bebasnya telah diketahui dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dengan cara membandingkannya dengan t tabel.

Variabel	t hitung	Probabilitas
X ₁	-5.129	0.000
X ₂	1.058	0.037
X ₃	-4.497	0.000

Sumber: data olahan, 2010

- Variabel X₁ defisit anggaran, signifikan pada tingkat $\alpha < 0.05$ yang berarti defisit anggaran berpengaruh terhadap inflasi.
- Variabel X₂, jumlah uang beredar signifikan pada tingkat $\alpha < 0.05$ yang berarti jumlah uang beredar berpengaruh terhadap inflasi.
- Variabel X₃, independensi BI signifikan pada tingkat $\alpha < 0.05$ yang berarti independensi berpengaruh terhadap inflasi.

Menurut penelitian Andriani (2003), menyatakan semakin tinggi tingkat pergantian Gubernur Bank Indonesia maka semakin tinggi tingkat inflasi sehingga terjadi ketidakstabilan harga (*price instability*). Sebaliknya semakin rendah tingkat pergantian Gubernur Bank Indonesia maka semakin rendah pula tingkat inflasi sehingga terjadi stabilitas harga.

Hasil penelitian Ardiono (2008) menyatakan bahwa jumlah uang yang beredar cenderung mempengaruhi inflasi. Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menentukan tingkat suku bunga (SBI), melalui instrument politik pasar terbuka, pemerintah harus lebih mengontrol volume uang yang beredar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena naik turunnya jumlah uang yang beredar merupakan sumber utama inflasi untuk Negara sedang berkembang seperti halnya negara Indonesia.

Uji F

F-statistik menggambarkan hasil analisa regresi variabel independent secara bersama-sama terhadap variabel dependent.

F-Hitung	Probability
11.824	0,000

Sumber : Hasil oleh data 2010

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa F hitung sebesar 11.824 dan dengan probabilitas 0.000000, dengan tingkat $\alpha = 0,05$, dapat dilihat bahwa probabilitasnya lebih besar dari α yaitu $0,000000 < 0,05$, dengan demikian variabel independent secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent.

KESIMPULAN DAN SARAN

Inflasi merupakan indikator negatif bagi perekonomian suatu negara, karena dapat mengganggu kestabilan perekonomian secara menyeluruh. Tingkat inflasi yang sangat tinggi selain merusak harga juga dapat menghambat investasi yang akan mengurangi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Disamping itu, inflasi yang tinggi juga mempersulit perencanaan ekonomi dan yang lebih berbahaya lagi dapat memicu terjadinya konflik sosial dan politik seperti yang terjadi di Indonesia pada tahun 2007-1998 ketika inflasi sangat tinggi mencapai 11,05 dan 77,63 %.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh defisit anggaran pemerintah, jumlah uang yang beredar dan Independensi BI berdasarkan Undang-undang no.23 tahun 1999 terhadap inflasi di Indonesia dalam kurun waktu antara tahun 1990 - 2008 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang cukup signifikan antara defisit anggaran pemerintah, jumlah uang yang beredar dan independensi BI terhadap inflasi di Indonesia.
2. Pengaruh secara simultan variabel defisit anggaran pemerintah, jumlah uang yang beredar dan independensi BI terhadap inflasi ditunjukkan dengan nilai $R^2 = 70,3\%$, dan sisanya 29,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.
3. Inflasi di Indonesia tidak terlalu berfluktuasi, walaupun pada tahun-tahun tertentu inflasi pernah mencapai titik tertinggi dengan *double digit*, tetapi secara keseluruhan inflasi dari tahun 1990 sampai pada periode sebelum krisis menunjukkan angka yang cukup stabil. Kenaikan inflasi yang cukup tajam terjadi pada tahun 1998, dimana laju inflasi mencapai angka 77,63%.
4. Sesuai dengan Hasil empiris yang ditemukan, penambahan jumlah uang yang beredar dalam arti luas (M2) yang berarti ekspansi kebijakan moneter merupakan salah satu variabel yang signifikan mempengaruhi inflasi pada periode tahun 1990-2008. Hal ini dinyatakan dengan angka koefisien regresi untuk jumlah uang beredar (X_2) adalah sebesar 2.306 yang berarti apabila terjadi peningkatan jumlah uang yang beredar sebesar 1 satuan maka inflasi akan naik sebesar 2.306 satuan.
5. Dari ketiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini variabel bebas independensi BI sebagai *dummy variabel* mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap laju inflasi. Dengan koefisien regresi sebesar -30.861 yang berarti secara parsial periode sebelum independensi BI berpengaruh negatif sebesar 30.861 satuan terhadap laju inflasi dan setelah independensi BI berpengaruh positif sebesar 30.861 satuan terhadap inflasi.
6. Variabel selanjutnya adalah defisit anggaran (X_1), dalam penelitian ini faktor defisit anggaran tidak

berpengaruh terhadap inflasi. Tidak adanya pengaruh defisit anggaran ini disebabkan karena pada periode sebelum independensi BI, penciptaan uang dilakukan secara hati-hati dan tidak terus menerus. Hal tersebut dibuktikan dengan terdapatnya surplus anggaran pada tahun-tahun tertentu. Setelah independensi BI, pembiayaan defisit anggaran lebih banyak dibiayai dengan pinjaman luar dan dalam negeri. Dengan cara menggunakan pinjaman dalam dan luar negeri maka defisit anggaran tidak akan menimbulkan pengaruh yang sangat besar terhadap inflasi karena dana yang dipakai adalah tabungan pemerintah.

7. Dengan kecilnya pengaruh defisit anggaran terhadap laju inflasi di Indonesia maka dapat disimpulkan bahwa pada negara berkembang dengan derajat independensi Bank Sentralnya yang masih rendah akan terdapat hubungan yang kuat antara defisit anggaran dengan inflasi pada negara tersebut. Di Indonesia meskipun derajat independensi bank sentralnya masih rendah dibandingkan negara-negara maju akan tetapi pelaksanaan independensi terhadap BI telah mulai dilaksanakan secara bertahap dan sudah membuahkan hasil yang positif bagi perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian, yaitu terdapat hubungan negatif antara Independensi BI dengan Inflasi, karena independensi merupakan variabel dummy maka dapat diartikan terjadi penurunan inflasi pada periode setelah independensi. Dengan kata lain BI sebagai Bank sentral telah mampu melaksanakan Undang-undang no.23 tahun 1999 tentang independensi Bank Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (1990-2006) “ *Statistik Ekonomi Dan Keuangan Indonesia*” Bank Indonesia Cabang, Padang
- Boediono, (1981). “*Ekonomi Moneter, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5*”, BPFE, Yogyakarta.
- Djiwandono, J. Soedrajad (1998). “ *Independensi Bank Sentral dan Pengelohan Ekonomi Nasional*”, Jakarta
- Eijffinger, S.W.C (1997). “*The New Political Ekonomi of Central Banking*” Centre for Economic Research., London
- Fraser, B.W (Dec 1994). “*Central Bank Independen : What Does It Mean ?*” Reserve Bank Of Australia Buletin., Sydney
- Goeltom, Miranda.S (2000). “*Keijakan Ekonomi Makro Dengan Integrasi Pasar Uang dan Globalisasi*”, Jakarta
- Herlambang, Tedy, Sugiarto, Brastoro dan Said Kelana (2001). “*Ekonomi Makro: Teori, Analisis dan Kebijakan*”, : PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Insukindro, (1983). “*Soal Jawab Ekonomi Moneter*”., Edisi Pertama BPFE, Yogyakarta.
- Munir, Syamsudin, (1994). “*Dasar Dasar Tentang Uang dan Perbankan*”, Lembaga Penerbit Universitas Andalas, Padang
- Neyapty, Bilin, (2003). “ *Budget Deficits and Inflation, The Roles of Central Bank Independence and Financial Market Development*” ,. Manchester
- Samuelson, Paul A. 1997. *Ekonomi, Jilid I*. Jakarta: Erlangga
- Website Bank Indonesia, (www.BI.go.id)
- Website Badan Pusat Statistik, (www.BPS.go.id)
- Waluyo, Joko , 2006. *Pengaruh Pembiayaan Defisit Anggaran Terhadap Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Suatu Simulasi Model Ekonomi Makro Indonesia 1970-2003*.www.uajy.ac.id/jurnal/kinerja/Vol10-No.1./Article-1-V10-N1-06.pdf Diakses tanggal 27 Oktober 2010